#### ISSN: 2355-9365

# Penentuan Lokasi Optimal Gudang Bantuan Logistik Wilayah Jawa Barat Menggunakan Metode *Maximal Covering Location Problem* (MCLP)

1st Arifa Fadhillah Zahra
Fakutas Rekayasa Industri
Universitas Telkom
Bandung, Indonesia
arifafadhzahra@student.telkomuniversi
ty.ac.id

2<sup>nd</sup> Femi Yulianti Fakutas Rekayasa Industri Universitas Telkom Bandung, Indonesia femiyulianti@telkomuniversity.ac.id

3<sup>rd</sup> Putu Giri Artha Kusuma Fakutas Rekayasa Industri Universitas Telkom Bandung, Indonesia putugiriak@telkomuniversity.ac.id

Abstrak— Responsiveness merupakan indikator utama penilaian tingkat kinerja humanitarian logistics. Salah satu strategi yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian responsiveness adalah pre-positioning fasilitas logistik. Sebagai provinsi yang paling sering mengalami kejadian bencana, Jawa Barat menghadapi masalah mulurnya response time pendistribusian bantuan logistik ke 70,37% titik demand di wilayah kabupaten/kota. Kemuluran ini terjadi akibat penerapan kebijakan persediaan yang tidak tepat. Proses distribusi yang selama ini berlangsung dalam pola singleechelon membuat jangkauan pelayanan kabur seiring persebaran titik demand yang melebar. Sebagai upaya menekan response time agar berada pada batas 60 menit, diusulkan solusi penempatan gudang penyangga yang difungsikan sebagai penengah distribusi bantuan logistik antara BPBD Jawa Barat dan BPBD/Damkar kabupaten/kota. Adapun penetapan lokasi gudang penyangga dilakukan menggunakan pendekatan MCLP, yaitu sebuah metode untuk menentukan lokasi optimal fasilitas dengan fungsi tujuan memaksimasi pemenuhan kebutuhan dalam jangkauan yang telah ditetapkan. Metode MCLP yang digunakan dalam penelitian ini menyertakan beberapa parameter tambahan yang relevan dengan kiteria lokasi gudang bantuan bencana. Setelah dilakukan proses penyelesaian ditetapkan Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kota Sukabumisebagai lokasi dimana gudang penyangga akan

Kata kunci— Humanitarian Logistics, Gudang Bantuan Logistik, Kebijakan Multi-Echelon, MCLP

#### I. PENDAHULUAN

Bencana merupakan fenomena natural reaksi alam terhadap perubahan di sekitarnya. Namun meskipun tergolong natural, tetap saja bencana adalah ancaman serius bagi kehidupan masyarakat. Sepanjang tahun 2019-2022 atas kejadian bencana yang terjadi, teridentifikasi sekitar 2.440 menjadi korban jiwa, 277 orang dinyatakan hilang, 27.689 orang menderita luka-luka, 395.829 rumah mengalami

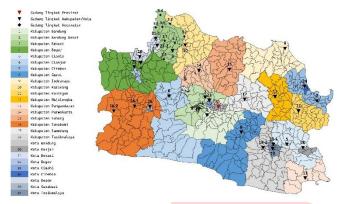
kerusakan, 3.889.731 rumah terendam, dan 21.092 fasilitas umum rusak [1]. Bersama dengan mencuatnya isu bencana, masyarakat secara kolektif menjalankan serangkaian upaya untuk memperkecil paparan dampak termasuk mengurangi jatuhnya korban, kerusakan properti, dan kerusakan lingkungan. Seiring berkembangnya pengalaman dalam menanggulangi bencana, empat fase pendekatan diperkenalkan sebagai bagian dari manajemen bencana komprehensif. Keempat fase tersebut antara lain, mitigation, preparedness, response, dan recovery [2]. Preparedness dan response adalah fase dimana logistik memegang peran kunci keberhasilan operasi penanggulangan bencana.



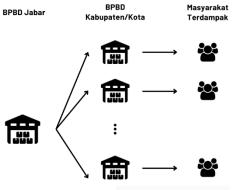
GAMBAR 1 (Dampak Kejadian Bencana di Indonesia Per Tahun 2019-2022)

Dalam dunia manajemen bencana dikenal istilah humanitarian logistics dan keberhasilan humanitarian logistics dapat diukur lewat 5 indikator, antara lain responsiveness, agility, reliabilitas, biaya, dan komunikasi antara stakeholder [3]. Di antara kelima indikator, responsiveness dicap sebagai ukuran performa paling krusial dalam humanitarian logistics [4]. Bicara tentang responsiveness, pre-positioning fasilitas menjadi topik yang tak boleh ketinggalan untuk dibahas. Pre-positioning fasilitas di lokasi strategis adalah hal yang penting dilakukan sebagai salah satu untuk mendorong keterpenuhan ekspektasi responsiveness

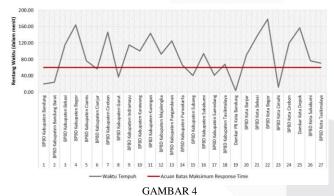
[5]. Strategis disini merujuk pada *trade-off* antara kedekatan jarak ke titik konsumsi dan keamanan gudang.



GAMBAR 2 (Lokasi Gudang *Existing* di Wilayah Jawa Barat)



GAMBAR 3 (Kebijakan Persediaan *Existing* di Wilayah Jawa Barat)



(Waktu Tempuh BPBD Provinsi Jawa Barat ke BPBD Kabupaten/Kota)

Sebagai provinsi yang terbagi ke dalam 18 wilayah kabupaten dan 9 wilayah kota, responsiveness menjadi hal tricky bagi BPBD Jawa Barat selaku inisiator penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Barat. Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat menghadapi permasalahan mulurnya response time distribusi bantuan logistik pra bencana ke sebagian besar wilayah kabupaten/kota. Permasalahan ini muncul disertai gejala dimana 70,37% response time ke 27 wilayah kabupaten/kota melebihi 60 menit. Faktor jangkauan coverage, jarak, infrastruktur, dan pemilihan moda transportasi ditengarai menjadi alasan dibalik tumbuhnya masalah ini. Untuk itu dengan mempertimbangkan akar masalah pada faktor jangkauan coverage, jarak, dan infrastruktur, diusulkan penggantian kebijakan sistem

persediaan single-echelon menjadi multi-echelon. Dalam merancang solusi ini, digunakan maximal covering location problem (MCLP) sebagai metode penentuan lokasi optimal penempatan gudang penyangga untuk menjembatani aktivitas pendistribusian bantuan logistik antara BPBD Jawa Barat dan BPBD/Damkar di bawah jangkauan pelayanan masing-masing lokasi terpilih.

#### II. KAJIAN TEORI

#### A. Humanitarian Logistics

Keberadaan logistik dalam sistem integral upaya penanggulangan bencana mulai mendapatkan sorotan pasca tsunami dan gempa bumi berkekuatan 9,1-9,3 magnitudo mengobrak-abrik Aceh pada 26 Desember 2004 [6]. Kejadian bencana dahsyat yang terjadi 19 tahun silam memberikan bukti betapa kecepatan dan efisiensi logistik adalah kunci bagi efektivitas respon bantuan kemanusiaan pada fase tanggap darurat [7]. Dalam konteks kebencanaan, logistik berperan sebagai koordinator pendayagunaan berbagai sumber daya (bantuan logistik, manusia, *skill*, dan *knowledge*) untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana [6].

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di Indonesia pendayagunaan sumber daya untuk membantu korban bencana dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengelolaan bantuan logistik diatur dalam Peraturan BNPB Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik & Peralatan. Pasal 4 menyebutkan jika manajemen logistik bencana terbagi ke dalam 5 proses bisnis yaitu perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan. Di skala provinsi dan kabupaten atau di bawah kewenangan BPBD, manajemen logistik bencana merupakan tugas pokok Bidang Kedaruratan & Logistik.

## 1. Manajemen Logistik Pra Bencana & Pasca Bencana

Manajemen logistik pra bencana mengacu pada aktivitas pengelolaan logistik pada fase persiapan/kesiapsiagaan. Sedangkan manajemen logistik pasca bencana adalah aktivitas pengelolaan logistik setelah berakhirnya fase tanggap darurat menuju masa pemulihan fungsi-fungsi dasar kehidupan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring Evaluasi Manajemen Logistik dan Penanggulangan Bencana, pengadaan logistik dimulai dengan tahap perencanaan dan dilanjutkan dengan tahap pergudangan. Dalam Peraturan BNPB Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan, yang dimaksudkan dengan pergudangan adalah pegelolaan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran logistik dan peralatan dari gudang. Menurut pola penyelenggaraanya, pendistribusian terbagi ke dalam 2 jenjang yakni pendistribusian logistik dari BNPB ke BPBD provinsi dan pendistribusian dari BPBD provinsi ke BPBD kabupaten/kota. Berdasarkan Perka BNPB No. 26 Tahun 2014, pendistribusian logistik pra bencana dimaksudkan

sebagai *buffer stock* kesiapan penanggulangan bencana dan penguatan kelembagaan.

#### 2. Manajemen Logistik Tanggap Darurat

Manajemen logistik tanggap darurat diinisiasi proses pemetaan kapasitas sumber daya, termasuk ketersediaan logistik, gudang, dan sumber daya manusia. Selesai pemetaan, proses selanjutnya adalah perencanaan yang dilakukan oleh Unit Respon Logistik. Proses lanjutan dari perencanaan adalah pengorganisasian, yakni penunjukan Koordinator Bidang Logistik & Peralatan dan pembentukan dewan pengelolaan bantuan logistik. Setelah proses aktivasi posko selesai, tahap selanjutnya adalah proses penerimaan berupa pencatatan dan pengecekan jenis, jumlah, mutu, dan kecocokan antara bantuan diterima dan prioritas kebutuhan penyintas. Selesai diterima, bantuan disimpan sedemikian rupa dan kembali dilakukan pengecekan stok persediaan secara periodik. Proses pengelolaan bantuan berakhir setelah bantuan logistik diangkut dari <mark>gudang ke titik distribusi untuk</mark> kemudian didistribusikan ke p<mark>enyintas.</mark>

#### B. Bantuan Logistik

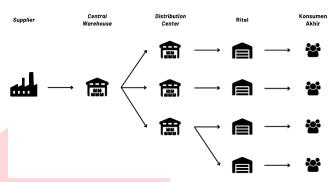
Menurut Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 25 Tahun 2014, bantuan logistik adalah kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, dan papan/turunannya yang disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pihak yang membutuhkan, rentan, atau terdampak bencana. Sebagai kebutuhan yang difungsikan untuk meringankan penderitaan penyintas juga menekan kemungkinan bertambahnya korban jiwa, Perka BNPB No. 10 Tahun 2012 menekankan jika penyaluran/pendistribusian bantuan logistik wajib menegakkan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 mengategorikan bantuan logistik berdasarkan 3 sumber pendanaan yaitu: a) Dana Kontinjensi yang diperuntukkan mendanai dukungan logistik kesiapsiagaan atau penguatan kelembagaan; b) Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk mendanai pengadaan kebutuhan penaggulangan fase tanggap darurat termasuk pengadaan pangan, sandang, papan, air bersih & sanitasi, serta barang/jasa yang bersinggungan dengan proses pencarian & penyelamatan, pertolongan darurat, evakuasi, serta pelayanan kesehatan; dan c) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang diperuntukkan mendanai upaya rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana. Merujuk pada Perka BNPB Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana, bantuan logistik penguatan kelem-bagaan sifatnya adalah impuls guna mendorong BPBD ikut aktif menjaga jumlah persediaan sesuai atau di atas standar pemenuhan kebutuhan (menutupi kebutuhan pada 72 jam pertama pasca terjadi kondisi darurat).

## C. Struktur Supply Chain

Supply chain terbagi ke dalam 2 jenis struktur yaitu single-echelon dan multi-echelon. Istilah echelon disini merujuk pada jumlah tingkatan yang terbentuk atas interaksi yang berlangsung antar titik fasilitas sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Struktur single-echelon adalah struktur dengan satu tingkat titik fasilitas yang berinteraksi menerima replenishment dan melakukan pengiriman ke konsumen [9]. Interaksi yang berlangsung dalam struktur single-echelon bersifat desentralisasi [10]. Berbanding terbalik dengan karakteristik single-echelon, multi-echelon merupakan

struktur tersentralisasi. Kebijakan *inventory multi-echelon* terbentuk dari 2 atau lebih tingkatan yang saling berasosiasi dalam interaksi yang plural [11]. Masing-masing titik fasilitas saling dependen memengaruhi parameter persediaan [12]. Tujuan fungsi dari kebijakan *multi-echelon* adalah meminimasi total biaya persediaan lewat pengoordinasian seluruh titik fasilitas dalam *supply chain* [11].



GAMBAR 5 (Contoh Struktur Multi-Echelon)

#### D. Facility Location Problem

Facility location problem (FLP) dipandang sebagai permasalahan optimisasi yang berupaya menemukan lokasi terbaik penempatan fasilitas berlandaskan pada aspek seperti segmentasi demand menurut wilayah, biaya operasional fasilitas, dan jarak tempuh [13]. Karakteristik tersebut membuat formulasi FLP tidak akan jauh dari kasus ketercakupan/pemenuhan (covering problems), kasus titik pusat jaringan (center problems), dan kasus median jaringan (median problems). Metode MCLP dan Set Covering Problem (SCP) mewakili bentuk FLP jenis covering problems sementara P-Median Problem (PMP) merupakan bagian dari median problems. MCLP dan PMP berurusan dengan jenis kategori masalah yang sama dimana keduanya berusaha menempatkan fasilitas di lokasi yang membuat total jarak antar jaringan menjadi seminim mungkin [14]. Hanya saja sayangnya beberapa penelitian menemukan bahwa PMP belum menghasilkan solusi yang mengoptimumkan ketercakupan, sebab prinsip modelnya membuat nilai demand tidak lebih penting dari parameter waktu [15].

## E. Response Time

Dalam konteks logistik komersial, response time mengacu pada waktu yang berjalan dari *purchase order* (PO) diterbitkan sampai produk berhasil sampai ke tangan konsumen [15]. Mudahnya, *response time* adalah indikator yang mengukur kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Sementara itu dalam layanan darurat, *response time* didefinisikan sebagai waktu yang bergulir antara diterimanya notifikasi atau panggilan darurat dan datangnya bala bantuan ke lokasi [16].

## III. METODE

#### A. Maximal Covering Location Problem (MCLP)

Maximal covering location problem (MCLP) merupakan salah satu pendekatan matematis untuk menyelesaikan permasalahan penentuan lokasi fasilitas. Fungsi tujuan MCLP adalah memaksimalkan jumlah populasi terlayani

dalam jangkauan jarak atau waktu pelayanan yang telah ditentukan dan dengan jumlah fasilitas yang terbatas [16].

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap skenario penanggulangan bencana di wilayah Nepal, dilakukan sejumlah modifikasi pada model MCLP milik Church & ReVelle [14]. Modifikasi tersebut berupa penambahan variabel yang menyatakan nilai prioritas pada setiap titik demand dan penambahan batasan yang menyaring calon kandidat fasilitas menurut tingkat aksesibilitas transportasi, indeks pengembangan manusia, dan tingkat keamanan bencana. Kemudian untuk membuat persamaan dapat dijalankan, dilakukan sedikit penyesuaian terutama pada fungsi pembatas ke-5. Selain modifikasi yang cukup major, penulis juga mengganti lambang beberapa variabel. Setelah melalui sejumlah modifikasi, persamaan model MCLP penentuan lokasi gudang penyangga bantuan logistik wilayah Jawa Barat adalah sebagai berikut:

$$Maximize \qquad \sum_{i \in I} p v_i a_i y_i \tag{1}$$

S. T. 
$$\sum_{j \in N_i} x_j \ge y_i \qquad \forall i \in I \qquad (2)$$

$$\sum x_j \le P \tag{3}$$

$$\sum T_j x_j \ge N_T \sum x_j \qquad j \in J \tag{4}$$

$$\sum D_j x_j \ge N_D \sum x_j \qquad j \in J \tag{5}$$

$$\sum R_j x_j \le N_R \sum x_j \qquad j \in J \tag{6}$$

$$x_j \in \{0, 1\} \qquad \forall j \in J \tag{7}$$

$$y_i \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I \tag{8}$$

#### Keterangan:

i titik demand

= titik kandidat fasilitas Ι kumpulan titik demand

kumpulan titik kandidat fasilitas =

 $pv_i$ nilai prioritas pemenuhan demand (diambil dari nilai kepadatan penduduk) di i

demand di i  $a_i$ 

 $= \{ j \in J \mid d_{ij} \le S \}$  $N_i$ 

 $d_{ii}$ = jarak terdekat dari i ke j

S jarak di luar batas dimana titik demand dianggap tidak terpenuhi

P jumlah fasilitas yang hendak ditempatkan

 $T_i$ nilai aksesibilitas transportasi (diambil dari nilai kepadatan jalan) di i

batas minimum nilai aksesibilitas transportasi  $N_T$ 

 $D_i$ indeks pengembangan manusia di j

batas minimum indeks pengembangan manusia  $N_D$ 

 $R_i$ = Indeks risiko bencana di j

batas maksimum indeks risiko bencana

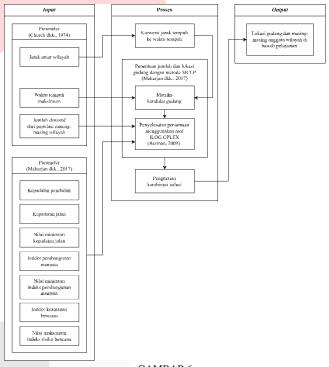
1 jika fasilitas ditempatkan di j

0 sebaliknya

 $\left\{ egin{array}{ll} 1 & \mbox{jika } demand \ \mbox{di } i \ \mbox{terpenuhi} \\ 0 & \mbox{sebaliknya} \end{array} 
ight.$ 

#### B. Kerangka Berpikir

GAMBAR 6 menunjukkan mekanisme metodologi penelitian dalam pendekatan white box. Visualisasi semacam ini membantu peneliti mengenali struktur aliran input dan output sistem dengan lebih baik. penulis bisa mengetahui bahwa untuk mendapatkan output seperti diekspektasikan terdapat 4 proses dan 3 fase untuk dilewati dimana fase ke-1 mengabsorpsi komponen input dalam bentuk mentah, fase ke-2 mengabsorpsi sebagian *input* yang sudah menjadi work in process (WIP) dan sebagian yang masih mentah, sementara fase ke-3 menerima input murni dalam bentuk WIP.



GAMBAR 6 (Metodologi Penelitian)

#### C. Kebutuhan Data

TABEL 1 (Kebutuhan Data - 1)

No	Data	Sumber	Pengolahan Data
1	Jarak antara BPBD Provinsi Jawa Barat ke BPBD dan Damkar kabupaten/kota	Google Maps	Digunakan untuk menunjukkan gejala dari situasi masalah yang dihadapi objek penelitian
2	Kejadian bencana di wilayah Provinsi Jawa Barat	Website BNPB	Digunakan untuk mengidentifikasi estimasi jumlah demand pada masing-masing wilayah kabupaten/kota

TABEL 2 (Kebutuhan Data - 2)

No	Data	Sumber	Pengolahan Data
3	Jarak antara kantor pemerintahan kabupaten/kota ke kantor pemerintahan kabupaten/kota seluruh wilayah Jawa Barat	Google Maps	Digunakan untuk menentukan kandidat lokasi gudang yang sesuai dengan kriteria batas jangkauan waktu tempuh
4	Panjang jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di wilayah Jawa Barat	Publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat	Digunakan untuk menghitung kepadatan jalan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota
5	Panjang jalan tol di wilayah Provinsi Jawa Barat	Website BPJT dan Google Maps	Digunakan untuk menghitung kepadatan jalan pada masing-masing wilayah kabupaten/kota
6	Luas wilayah Provinsi Jawa Barat	Publikasi tahunan BPS Provinsi Jawa Barat	Digunakan untuk menghitung kepadatan jalan dan kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota
7	Jumlah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat	Publikasi tahunan BPS Provinsi Jawa Barat	Digunakan untuk menghitung kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota
8	Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat	Publikasi Tahunan BPS Indonesia	Digunakan untuk mengeliminasi kandidat lokasi gudang yang tidak sesuai dengan kriteria tingkat pembangunan
9	Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)	Buku IRBI	Digunakan untuk mengeliminasi kandidat lokasi gudang yang tidak sesuai dengan kriteria tingkat ketahanan bencana

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konversi Jarak Tempuh ke Waktu Tempuh

Pada proses pengumpulan data, penulis membagi jalan ke dalam 2 kategori yaitu jalan bebas hambatan dan jalan antarkota/kawasan perkotaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan, pada jalan bebas hambatan kendaraan wajib melaju minimal 60 km/jam dan maksimal 100 km/jam. Sementara itu, Kepala Lab Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno memberikan keterangan bahwa di jalan raya rata-rata truk bermuatan melaju sekitar 40 km/jam (Berita Trans, 2018). Mengingat armada yang umum digunakan mengangkut bantuan logistik adalah truk maka diambil

keputusan bahwa setiap 1 km jarak yang ditempuh di jenis jalan bebas hambatan akan dikonversikan menjadi 1 menit begitupun setiap 1 km jarak pada jalan antarkota/kawasan perkotaan akan dikonversikan menjadi 1,5 menit.

TABEL 3 (Hasil Koversi Jarak Tempuh ke Waktu Tempuh)

	Kandidat	751.41	]	Waktu Z Menurut J (Me				
No	Lokasi Gudang	Titik Demand		Bebas ambatan	Antarkota atau Kawasan Perkotaan	Total		
1	1	2		21,49	3,17	24,66		
2	1	3		106,65	3,73	110,38		
	•••	•••				•••		
350	25	27		138,84	84,51	223,35		
351	26	27		36,60	107,53	144,13		

## B. Matriks Kandidat Gudang

Untuk menyederhanakan penyelesaian parameter " $N_i$ ", penulis menyeleksi kandidat lokasi gudang syarat waktu tempuh  $\leq$ 60 menit secara terpisah menggunakan Excel. Matriks waktu tempuh menjadi *input* untuk mengeksekusi fungsi IF dengan kondisi ketika waktu tempuh  $\leq$ 60 maka nilainya adalah 1 sementara jika bukan maka nilainya adalah 0.

14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	12	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.63	24.66	1:0 98	150.69	100,68	35.95	165.97	54,22	156,67	95.47	105.78	116.22	109,53	(1.85	18.68	113,26	65,03	51.42	17,03	110.75	152.90	172.48	29,79	11423	140.80	75.66	91.8
2	25,60	0.00	11,87	15579	139,12	3535	160.52	3536	130,62	7480	30925	176,17	155,00	4127	40.87	50,00	9531	3547	12,32	172,70	118,50	255,03	6,86	11727	123/50	2520	35,1
3	150,58	51,82	6.00	54,17	190,08	52,52	169,27	155.62	115,15	23,13	189,28	169.72	250,52	25,55	51.66	112.72	150,43	33,85	104,18	236.61	30,35	74,85	5.3	157.67	55,32	71,67	1:1,
4	160,43	341,93	64.27	2,00	240.00	69,85	219,16	202.34	165.02	63,10	239,10	156.21	286.00	365,45	131,73	74.53	235,27	233,83	154,30	216.10	44,85	18,64	145,55	217.57	7,97	61,53	251,
5	100,08	:01.15	193 CS	250.00	9 69	133.25	02.07	50.51	101.02	179.13	10.00	50.33	45.25	345.75	125.95	196,41	65,77	22.75	88.85	11.00	213,08	251.92	105 95	90,00	229,00	150.21	19.5
	5555	3535	10,10	16,61	1958	nen	186.7	96,67	177,88	19.77	actions	115,47	186,00	400	12,17	NO.NE	9584	125,21	48,67	155.26	79,17	45.49	36,23	176,77	7577	21.03	170
7	151,07	:41,91	109,27	218.16	82,92	.75,11	6,00	117.70	42,67	151,47	18.53	2.33	100,64	251,55	:4.15	2536	84,11	76,35	129,29	10,00	181,50	125,37	143,20	2,44	202,50	155,40	37.4
8	64,22	67,67	135,62	202.84	50,51	13,20	117,70	0,00	127.43	130,15	74,73	50.44	80,41	364,83	129,65	156.61	37,90	29,31	10.12	66.77	173.28	130,71	64.25	181.37	154.25	116,41	10.0
9	139,97	143,92	105.03	105.02	101,07	172.65	12.77	127.43	0.60	29.03	27,16	42.57	147.22	85.40	29.26	231.39	79.87	301.27	124 97	129.23	194,97	175.00	110 57	34.90	150,02	190,95	15.2
10	40,77	27,00	30,70	101,100	18,13	39.77	112,47	119,18	0.00	8508	125.10	125,73	224,35	39.05	52.16	151,75	105/55	165(9)	88,25	190,55	35,40	95.16	41,45	153,98	name.	19,95	317
11	184,44	362,21	107,75	210.10	40,81	200,00	38.14	74,73	57,55	175,10	5,35	26,14	82,30	174,50	1.7,29	307.08	130,76	27,47	131,45	45,55	21:,8:	251,61	145,45	at,c.	224,60	217,60	481.0
12	180,22	223.37	139.72	156.21	50.32	149.57	21.03	29.64	47.52	125.73	16.14	5.00	97.67	77.60	37.28	200.25	50.50	60.07	102.03	67.30	161.90	101.57	115.65	10.77	172.70	165.73	22.3
13	109,55	253,00	236.00	240,70	25,21	169,60	1002	88,41	113,22	224,70	42,78	96,53	2023	192,32	MEGA	217/01	110,00	39.10	1805	90,90	290,90	327,05	151.46	976,18	276,52	201,41	51,0
14	61,61	45,27	15.15	133,40	164,78	400	111,35	totab	85/0	35,05	125,36	77,30	198,58	80.0	57.18	1:7.75	190,55	131,85	1742	1101.43	75,40	115,15	477.5	114.00	8491	77,32	112,
15	55,85	40,47	\$1.65	111.73	122,00	72,37	14.25	119.65	73,05	67,16	1.7,20	67.56	164.60	67,39	C.X	109.70	85,11	146,41	15.00	115.10	1042.	145,51	19.00	66.76	.17,63	155,22	121,2
16	117.00	99.67	112.72	74,53	190,41	69.67	235.05	126.51	251.18	151.20	907.68	200.25	232.34	132.77	299.78	2.00	158.77	587.13	109.75	211.29	113.90	65.38	96.23	237,17	91.97	79,20	124
17	65,81	3815	135.45	295,17	65,75	SEAL	AUT	12,94	79,81	141,45	10626	50,53	196,00	165,75	45,38	190,01	3.03	45.72	17,17	05,00	178,00	141,71	.96,25	87,23	150,40	117,71	20,8
18	93,42	15,47	1203,205	200,00	21,71	24,21	78.51	25,0	104,22	180,90	1727	MUS2	N431	131,01	1416/45	164,13	80,72	113.01	25000	10,61	$\mathrm{MM}_{\mathrm{c}} \approx$	165,77	:2.78	8.11	167,00	164,88	17,00
19	17,06	18,39	104,15	154.50	80,81	47,97	129,20	50.52	124,07	89,75	151,45	102.03	199,00	27,42	15.00	120.23	42,87	79,65	C.XC	136.60	126,60	165,95	6.77	112.70	180.60	67,11	79.8
20	118.77	122,23	206,91	216.10	18.00	151,65	58.26	68,77	109.53	193,53	93,50	67.06	35,58	159.43	135 83	211.79	85,85	49.75	106.60	0.00	228.83	265.50	131.34	72.72	242.63	174,27	31.2
21	152,90	1100	10,16	14,46	715,30	29.12	120.56	125,28	199,61	35.40	2101	110,00	200,90	76,40	107,21	111,40	1000	201,75	13630	280,83	0.00	5757	117.95	190,57	10,49	100,90	2011
22	122,48	3500	75.53	11,54	254,32	45,49	278,87	1805	179,00	125,516	a1,4z	230.50	222,00	113,13	MAN	N1,58	163,60	165,77	165,03	ZNLAG	57,57	15.0	1101,05	210.17	25,87	MEZ	ats.
28	19,58	6,60	15.13	145.05	103,93	36,78	143,20	64.53	186,57	81,45	165,45	115.63	15.,48	47,65	19.00	96.53	\$6,51	92,28	6.77	121.34	117,93	153,55	6.00	142.92	186,18	27,53	10.0
24	144.23	347.52	167,87	217.37	65,60	175,72	9,43	131.37	34.61	153,88	23.21	30.79	100.68	254,00	18.78	237.27	85,23	81,13	192.58	72.72	190.67	233,37	142.92	0.00	200.08	195,54	72.3
3%	101,85	22,00	16,10	2,507	790,00	75.77	202.50	114,19	19,0	CHES	274.00	175,20	234,92	29.65	11765	145,513	155,90	100,70	17875	242,73	33,47	2500	13610	2754,788	0.00	20.36	27%
26	75,85	38,40	nar	N/W	18641	2002	198,40	11641	196,98	138,88	2.785	138.75	200,0	17,32	115.25	$S_{ij} (K)$	11/45	145,85	8631	1/1/17	100,00	asse	17/63	1,01,14	87,35	8.08	314
27	91,88	55,33	181,22	191,92	15,51	.24,83	67.46	58,34	95,25	167,28	48.50	52.52	51,02	132,57	121,39	154.57	58,91	9.50	79,80	5.,15	204,02	245,74	90,50	72,13	223,65	144,13	6.3

GAMBAR 7 (Matriks Waktu Tempuh)

14	1	2	3	4	5	6	7	8	,	10	11	12	13	14	15	16	17	11	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	3.63	24.66	1:0 98	150.69	100,68	35.95	165.97	54,22	159,67	95 47	20578	116.22	109,53	(183	18.68	113,26	65,03	51.42	17,03	110.75	152.90	172.48	29,73	114.23	140.80	75.05	91.88
2	25,60	0.00	41,87	15579	138,12	3535	160.57	25255	150,62	7480	30925	176,17	155,00	4127	40.87	90,00	9531	3547	12,32	132,00	11650	254,03	6,86	11727	123/50	3580	95,63
3	150,58	51,82	6.00	54,17	190,08	52,52	169,27	155.62	115,15	20,10	189,28	169.72	250,52	25,55	51.66	112.72	150,43	33,85	104,18	236.81	30,35	74,85	5.3	157.67	55,32	71,67	111,22
4	160,43	341,03	64.27	2,00	240.00	69,85	219,16	202.34	165.02	83,10	239,10	156.21	286.00	365,45	131,73	74.53	235,27	233,83	154,30	216.10	44,85	18,64	145,55	217.57	7,97	61,53	151,52
3	100,08	381.17	193 CS	290,00	9 69	193.25	02.07	50.51	100,00	179.13	10.00	50.33	45.25	365.75	125.95	196,41	65.77	22.75	89.85	11.00	211,08	191.92	105 95	90,00	229,00	150.21	19,19
.6	5555	3535	10,10	16,61	1997	non	180.7	96,87	177,88	19.72	actions	115,17	1,94,940	400	12,17	NO,N2	9584	125,27	4557	151.26	79,17	4049	56,23	1/6,77	7577	21.03	175,000
1	155,07	:45,92	169,27	218.16	82,07	.75,12	6,00	117.20	42,67	151,47	18.23	2.33	100,64	31,55	:4.15	255.05	84,11	76,35	129,29	10,00	181,50	125,30	145,20	2,44	202,50	195,40	57.4h
	64,22	67,67	135,62	202.84	50,51	23,20	117,70	0,80	127.43	130,15	74,73	50.44	80,41	364,83	129,65	156.61	37,90	29,31	10.12	60.77	173.28	130,75	64.25	181.17	154,25	116,41	18.04
9	139,97	141,92	105.05	105.02	101,07	172.65	12.77	127.13	0.60	29.03	27,16	42,57	147.22	85.40	25.16	221,39	79.60	101.27	124 97	109.00	194,97	175.60	119 57	34.90	150,02	190,95	95.16
10	40,77	27,00	30,70	101,100	18,0	39.77	112,47	119,18	0.00	non-	125.10	125,73	224,35	29.05	52.16	151,25	105/5	165,90	15,25	1902/5	35,40	95.16	41.45	150,00	name.	1909	\$67.2%
11	184,44	362,20	107,75	210.10	40,81	200,00	38.14	74,73	57,55	175,50	5,35	36,14	82,30	124,50	1.7,29	337.08	130,75	27,47	131,45	45,56	21:,8:	251,61	105,45	44,4.	224,60	217,80	48.20
12	180,22	123.97	139.72	156.21	50.32	149.57	21.03	29.64	47.52	125.73	16.14	5.00	97.67	77.60	37.28	200.25	50.50	60.87	1C2.C3	67.30	161.90	101.57	115.63	30,73	172.70	165.73	72.72
13	159,55	253,00	238.30	240,70	25,21	169,60	10UM	88,41	112,22	324,70	32,78	98,50	3000	192,12	MEGA	212/01	110,00	49.10	1805	30,00	790,90	227,05	1:146	176,18	776,57	201,41	11,00
16	61,61	45,27	15.15	133,40	164,78	406	121,35	totab	85,40	39,05	125,36	17,30	198,58	BAB	57.18	1:2.25	190,55	131,83	17.42	1111.43	75,49	115,15	477.5	114.00	8491	74,32	112,57
15	55,85	40,67	\$1.65	111.73	122.00	72,37	14.25	119.65	72,05	67,16	1.7,20	67.56	164.60	67,39	C.X	109.70	85,15	546,41	15.00	115.10	1042.	145,51	19.00	66.76	.17,63	155,23	121,29
16	117.00	93.67	112.72	74,57	190,41	69.67	235.05	126.51	251.18	151.20	907.68	200.25	232.34	102.77	199.78	2.00	158.77	58773	109.73	211.29	113.90	65.78	96.29	237,17	91.97	79.20	144.67
17	65,81	3075	135.45	2%,17	0,8	SEAL	ARTE	12,94	79JH	181,85	10628	50,53	196,00	160,75	45,38	170,03	3.03	45.22	17,17	65,60	178,00	141,71	36,25	10,21	150,40	117,71	20,81
18	93,42	15,47	1203,205	200,00	23,71	24,25	78.51	21,0	100,22	180,50	17,17	MUS2	N431	131,01	546,45	160,13	80,72	HAR	750.0	10,61	MILCO	165,77	:7.78	5 ,1.1	167,00	164,85	5,00
19	17,06	18,32	104,15	154.30	\$9,81	47,57	129,20	50.52	124,07	89,75	151,45	102.03	199,35	27,42	15.00	100.73	42,87	79,65	C.X	136.60	126.60	165,99	6.77	112.78	180.60	67,11	79.50
20	118.77	122.20	506.31	216.10	18.00	151.65	58.26	68,77	109.53	193,53	19.10	67.06	35,58	159.43	135 83	211.79	85,86	49.75	706.60	0.00	228.83	265.50	11134	72.72	242.63	174,27	31.25
21	150,00	1100	10,16	14,66	71.50	29.12	120.56	125,78	194,61	35.40	2131	150,00	200,91	76,40	107.71	111,80	1000	301,75	13630	280,83	3,63	57.57	117.85	110,07	10,49	100,90	201,62
22	122,68	SMIT	75.83	13,54	254,92	49,49	278.17	THUS	179,00	125,516	201,42	250.50	222,38	112,13	MAN	NI, SE	163,63	185,77	165,53	ZNLAD	57,57	man	18635	210.17	25,87	MEZ	248.75
28	19,58	6,60	15.13	145.55	102,93	36,78	143,20	64.53	186,57	81,45	165,45		15.,48		19.00	96.53		92,28	6.77	121.34	117.93			142.92	186,18	27,58	10.10
24	144.23	347.52	167,87	217.37	65,60	175,72	9,43	131.37	34.61	153,88	23.21	30.79	100.68	154.00	18.78	237.27	85,23	81,15	192.58	72.72	190.67	230,37	142.92	0.00	200.08	195,54	72.13
25	101,85	22,50	16,10	2,507	798,311	75.77	202.50	154,19	197,52	CHES	274.00	175,20	234,92	29.65	11765	145,513	155,90	103,49	17975	242,23	31,47	25,00	18610	200708	363	20.36	22535
26	75,00	33,43	nar	N1/88	18641	2002	125,40	11641	196,98	138,88	2.785	138,75	280,0	17,32	155.25	55,75	11/45	145,85	86.11	1/1/17	100,00	8907	17,63	1,05,14	87,35	800	345.78
27	91,88	55,33	121,22	101.02	15,51	.24,83	57.46	58,34	95,25	167,28	48.50	52.52	51,03	132,57	121,39	154.57	58,91	9.80	79.80	3.,13	204,02	245,74	90.00	72,13	223,65	144,13	6.00

GAMBAR 8 (Matriks Kandidat Lokasi Gudang)

#### C. Penyelesaian Persamaan

Setelah mendapatkan matriks kandidat lokasi gudang, langkah selanjutnya adalah menyatakan matriks ke dalam bentuk persamaan model matematis sekaligus menyatakan parameter dan variabel keputusan dalam bahasa pemrograman C.

#### ISSN: 2355-9365

#### 1. Model

```
280

//Fungsi tujuan yang menyetakan bahwa lokasi gudang terpilih-
282

//harus bisa memaksimsai penenuhan demand untuk senua titik yang ada
2836 maximiza
284

(41**1)+(42**12)+(43**1)+(44**14)+(45**15)+(46**16)+(45**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16)+(46**16
```

## GAMBAR 9 (Fungsi Tujuan Tanpa *Priority Value*)

```
221

//Fungsi tujuan yang menyatakan bahwa lokssi gudang terpilih
//harus bisa memaksimasi penenuhan denand untuk semua titik yang ada
//harus bisa memaksimasi penenuhan denand untuk semua titik yang ada
//semaksimia/
//semaks
```

#### GAMBAR 10 (Fungsi Tujuan Dengan *Priority Value*)

#### GAMBAR 11 (Fungsi Pembatas Lokasi Gudang)

```
500

1 //Fungsi pembatas yang menyatakan bahwa tatal lakasi gudang terpilih.

10 //Filisinya tidak boleh lebih besar deri jamlah fasilitan yang sudah ditetapkan

11 XEKENEMBANDHERICHENGENDHERICHENGENDHERISHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERICHENGENDHERIC
```

#### GAMBAR 12 (Fungsi Pembatas Jumlah Gudang)

```
| Page | Design | Target | Page | Pag
```

#### GAMBAR 13

#### (Fungsi Pembatas Aksesibilitas Transportasi (Kepadatan Jalan))

#### GAMBAR 14

(Fungsi Pembatas Komponen Dasar Kualitas Hidup (IPM))

## GAMBAR 15 (Fungsi Pembatas Kerentanan Paparan Bencana (IRBI))

#### GAMBAR 16 (Variabel Keputusan Lokasi Gudang Terpilih)

#### GAMBAR 17

(Variabel Keputusan Titik Demand Terpenuhi/Terlayani)

#### 2. Data Masukan

## a. Demand

Pada model orisinal "a" didefinisikan sebagai populasi yang harus dipenuhi pada titik *demand* sementara pada model hasil modifikasi "a" disimpli-fikasikan sebagai *demand* [14]. Merujuk pada terminologi kedua peneliti, hal yang paling kompatibel mewakili "a" adalah jumlah rumah rusak/terendam akibat bencana sebagaimana pada praktiknya sebagian besar jenis ban-tuan logistik khususnya bantuan habis pakai hanya disalurkan saat kejadian bencana menimbulkan kerusakan fatal atau memaksa masyarakat tinggal di pengungsian [17].Dengan begitu penulis

memfokuskan lingkup peme-nuhan *demand* pada 3 jenis bencana yang menimbulkan dampak paling dominan yaitu banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

## b. Priority Value

Kepadatan penduduk merupakan salah tujuh variabel dalam model MCLP modifikasi. Variabel ini berfungsi mengurutkan prioritas pelayanan masing-masing wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dimana semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk maka akan semakin diutamakan pula pemenuhan kebutuhan wilayah tersebut [14].

(Demand)

Yang dimaksudkan varibel kepadatan penduduk disini bukan mengacu pada nilai kepadatan penduduk dalam satuan jiwa/km² melainkan nilai yang telah dikonversikan ke dalam integer dengan rentang 1-10. Integer ini didapat dari hasil perhitungan nilai tertinggi normalisasi kepadatan penduduk dibagi 10 dikali kelipatan 1-10 sampai terbentuk 10 tingkatan berbeda.

#### c. Jumlah Gudang Untuk Ditempatkan

Variabel yang satu ini nilainya tidak tetap karena pada kasus yang tengah diselesaikan penulis, menentukan jumlah gudang merupakan bagian dari tujuan dilakukan-nya penelitian. Untuk itu *running* model dilakukan berulang sambil mengganti parameter jumlah gudang sampai

GAMBAR 19

(Priority Value)

ditemukan solusi terbaik dimana semua wilayah dapat tertutupi demand-nya.

(Jumlah Gudang Untuk Ditempatkan)

```
10
11 //Jumlah gudang yang akan ditempatkan
12 int P=1;
13
GAMBAR 20
```

## Aksesibilitas Transportasi

Kepadatan jalan difungsikan sebagai penyortir lokasi kandidat gudang dalam aspek aksesibilitas jalan. Secara teori, lokasi gudang terpilih adalah lokasi dengan tingkat aksesibilitas baik berdasarkan kriteria berlaku. Kriteria berlaku sendiri mengacu pada satu nilai yang dijadikan batas minimum dalam penyortiran. Adapun karena Jawa Barat belum memiliki klasifikasi kepadatan jalan yang menyatakan tingkat kualitas aksesibilitasnya, maka penulis berinisiatif membuatkan rentang nilai dengan mengacu pada nilai kepadatan jalan ke-27 wilayah. Rentang ini yang ditampilkan dalam TABEL 4 didapat dari hasil perhitungan nilai tertinggi kepadatan jalan dibagi 6 dikali kelipatan 1-6 sampai terbentuk 6 tingkatan berbeda. Dari ke-6 tingkat tersebut, batas bawah tingkat 2 yang bernilai 1,719 dipilih sebagai batas minimum dalam fungsi pembatas aksesibilitas jalan.

TABEL 4 (Rentang Nilai Kepadatan Jalan)

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
1	0	1,719
2	1,719	3,438
3	3,438	5,157
4	5,157	6,876
5	6,876	8,595
6	8,595	10,314

```
//Batas minimum nilai aksesibilitas jalan
//Botak NT=1.71897876412535;

//Nilai aksesibilitas jalan pada 27 kandidat lokasi gudang
float T1=0.82374774316161;
float T2=0.547656838493762;
float T3=0.86301541375482;
float T3=0.86301541375482;
float T3=0.86301541375482;
float T6=0.45157645998121;
float T6=0.45157645998121;
float T7=1.56463529435664;
float T8=0.93946787158393;
float T8=0.93946787158393;
float T1=0.83299665869471;
float T1=0.83299685869471;
float T12=0.983662725938198;
float T13=0.582683168316832;
float T13=0.582683168316832;
float T14-1.1411027684259;
float T14-0.668649107901444;
float T18=0.552655819441124;
float T19=6.96313437108606;
float T19=6.96313437108606;
float T2=2.78324081416865;
float T2=2.78324081416865;
float T2=2.78324081416865;
float T2=2.78324081416865;
float T2=2.7832408141885;
float T2=2.7832408141885;
float T2=2.78324081493933753;
float T2=1.812863399641837;
float T2=1.812863399641837;
float T2=1.8138725847521;
float T2=1.8138725847521;
float T2=2.90979546646466;
```

GAMBAR 21 (Aksesibilitas Transportasi)

## e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah tujuh variabel anggota fungsi pembatas yang berperan menyeleksi kandidat lokasi gudang dan memastikan bahwa lokasi gudang terpilih adalah lokasi yang memang kompatibel. Dalam hal ini, IPM menyeleksi kandidat lokasi gudang berdasarkan aspek komponen dasar kualitas hidup.

Nilai yang dipilih sebagai batas minimum lulusnya kandidat lokasi adalah batas bawah kategori tinggi dengan nilai 70.

TABEL 5 (Rentang Nilai IPM)

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Rendah	0	59
Sedang	60	69
Tinggi	70	79
Sangat Tinggi	80	100

```
//Batas minimum indeks pengembangan manusia
47
       //Indeks pengem
float D1=73.16;
float D2=69.04;
                                mbangan manusia pada 27 kandidat lokasi gudang
        float D3=75.22;
        float D4=71.2:
        float D5=71.45;
float D6=65.94;
float D7=70.06;
        float D8=67.41;
        float D9=68.55;
        float D10=71.74;
float D11=70.16;
float D12=68.56;
        float D13=69.03;
        float D14=71.56;
         float D15=69.87:
        float D15=69.8/;
float D16=67.64;
float D17=72.69;
float D18=66.84;
        float D19=82.5;
         float D20=72.55:
        float D20=72.35;
float D21=82.46;
float D22=77.17;
float D23=78.77;
float D24=75.89;
        float D25=81.86;
         float D26=75.4
        float D27=73.83;
```

GAMBAR 22 (Indeks Pembangunan Manusia (IPM))

#### f. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

IRBI menyeleksi kandidat lokasi gudang berdasarkan aspek kerentanan paparan bencana. Hal ini merupakan kebalikannya dari model modifikasi dimana variabel "R" mengacu pada nilai yang menyatakan ketahanan wilayah terhadap bencana. Namun walaupun terdapat perbedaan dari segi kategori, keduanya tetap mewakili tujuan yang sama yaitu menghindarkan terpilihnya kandidat lokasi yang memiliki risiko tinggi terpapar bencana. Maka dari itu disini dipilih batas maksimum kategori sedang dengan nilai 144 dimana lokasi terpilih adalah kandidat lokasi dengan nilai IRBI di bawah dari 144.

TABEL 6 (Rentang Nilai IRBI)

Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Rendah	0	12
Sedang	13	144
Tinggi	145	>145

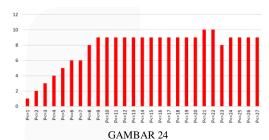
```
//Batas maksimum indeks risiko bencana int NR=144;
       //Indeks risiko bencana pada 27 kandidat lokasi gudang
81
82
       float R1=145.94;
       float R2=108.89;
       float R3=124.1;
float R4=116.54;
float R5=133.52;
       float R6=207.62;
       float R7=156.58;
       float R8=164.91
89
90
91
92
93
              R9=122.49;
R10=157.81;
       float R10=157.81;
float R11=113.58;
       float R12=136.35;
       float R13=137.36;
       float R14=128.98;
float R15=157.25;
float R16=186.61;
float R17=129.87;
       float R18=174.11;
       float R19=103.05:
       float R21=124.95
float R22=71.01;
       float R23=82.01;
       float R24=141.07:
       float R25=76.53:
```

## GAMBAR 23

(Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI))

## D. Penguraian Kombinasi Solusi

Setelah menuliskan persamaan model berikut parameter dan variabel keputusan dalam bentuk bahasa pemrograman, langkah selanjutnya adalah menjalankan model menggunakan ILOG CPLEX. Disini dijalankan 2 model berbeda dimana model pertama tidak menyertakan variabel *priority value* sementara model kedua sebaliknya.

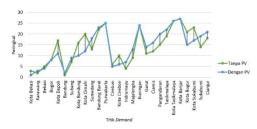


(Jumlah Gudang Berdasarkan Pergantian Parameter Batas Penempatan Gudang)



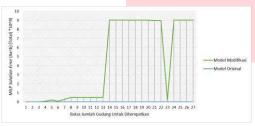
(Jumlah Gudang Terhadap Persentase Jumlah Wilayah Terlayani)

Dalam model modifikasi variabel *priority value* ditambahkan ke dalam fungsi tujuan untuk mengurutkan titik *demand* berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dimana wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi pantas diprioritaskan pemenuhannya. Dalam konteks penelitian ini, ditambahkannya variabel *priority value* pada fungsi tujuan memberikan perubahan signifikan terhadap peringkat *demand* di masing-masing wilayah. Dari 27 wilayah hanya 18,52%-nya saja yang bertahan dengan peringkat yang sama. Sementara dari sisi variabel keputusan, disertakan atau tidak disertakannya *priority value* tidak merubah jumlah atau lokasi terpilihnya gudang maupun terpenuhinya *demand*.



GAMBAR 26 (Perbandingan Peringkat *Demand* Tanpa *Priority Value* dan Dengan *Priority Value*)

Dari hasil penyelesaian menggunakan ILOG CPLEX didapati bahwa seluruh wilayah terpenuhi demand-nya saat batas penempatan gudang diberikan nilai sejumlah 5 atau lebih. Ketika  $P \le 6$ , MILP  $solution\ error$ -nya berada pada angka 8,88178E-1 yangmana nilai tersebut memegang posisi paling mendekati 0.



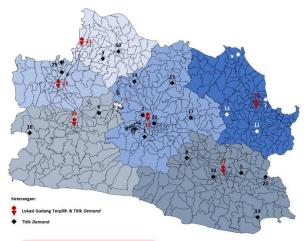
GAMBAR 27 (MILP Solution Error)

Kemudian karena metode MCLP ini terbatas hanya sampai memberikan informasi lokasi penempatan gudang tanpa ada informasi anggota wilayah di bawah pelayanannya maka disini keputusan biner yang dihasilkan akan coba diuraikan lebih lanjut. Penguraian tersebut dilakukan lewat cara manual dengan bantuan matriks waktu tempuh yang sebelumnya digunakan pada tahap penyeleksian kandidat lokasi gudang berdasarkan batas jangkuan.

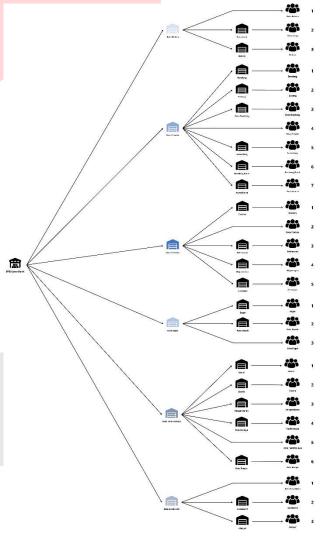
Langkah pertama untuk menguraikan solusi ini adalah menghapus waktu tempuh selain dari waktu tempuh titik demand ke lokasi gudang terpilih. Setelah itu barulah dilakukan pemisahan antara titik demand yang hanya bisa dipenuhi demand-nya oleh satu fasilitas dengan titik demand yang memiliki beberapa opsi fasilitas. Terakhir, pada titik demand dengan beberapa opsi fasilitas, pilih waktu tempuh bernilai terkecil dengan begitu didapat solusi optimal klusterisasi wilayah pelayanan berdasarkan kedekatan waktu tempuh lokasi gudang dan titik demand.

TABEL 7 (Penguraian Solusi)

Titik		Kandidat Lo	kasi Gudang		Lokasi Gudang	
Demand	Opsi Tunggal	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 3	Terpilih	
1	19.53				19,53	
2		6,60	53,40		6,60	
3	30,36				30,36	
4		44,86	18,64		18,64	
5	13,53				13,53	
6		44,49	36,73	21,00	21,00	
7	9,43				9,43	
8	38,04				38,04	
9	34,66				34,66	
10	35,40				35,40	
11			48,80		23,21	
12			52,52		30,73	
13	51,03				51,03	
14	47,05				47,05	
15	39,00				39,00	
16	39,20				39,20	
17		56,55	58,91		56,55	
18	9,80				9,80	
19	6,77				6.77	
20	31,25				31,25	
21	0,00				0,00	Kete
22	0,00				0,00	21
23	0,00				0,00	22
24	0,00				0,00	23
25		31,47	25,07		25,07	24
26	0,00				0.00	26
27	0.00				0.00	27



GAMBAR 28 (Peta Lokasi Gudang Terpilih)



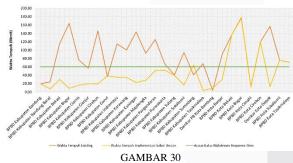
GAMBAR 29 (Pola Distribusi Lokasi Gudang Terpilih)

TABEL 8
(Urutan Prioritas Pelayanan Lokasi Gudang Terpilih)

				Per W	ilayah	Per Kluste	r Wilayah
No	Lokasi Gudang	Titik Demand	Waktu Tempuh Dari Lokasi Gudang Ke Titik Demand	Demand	Demand Berdasarkan Skala Prioritas	Total Demand	Total <i>Demand</i> Berdasarkan Skala Prioritas
		Kota Bekasi	0,00	26.333	236.997		
1	Kota Bekasi	Karawang	35,40	29.070	58.140	71.171	326.673
		Bekasi	30,36	15.768	31.536		
		Bandung	19,53	49.203	98.406		
		Subang	39,00	14.200	14.200		
		Kota Bandung	6,77	597	5.970		
2	Kota Cimahi	Kota Cimahi	0,00	328	3.280	65.874	123.402
		Sumedang	56,55	1.064	1.064		
		Bandung Barat	6,60	285	285		
		Purwakarta	47,05	197	197		
		Cirebon	9,43		29.454		
		Kota Cirebon					
	Kota Cirebon	Indramayu	34,66				67.174
		Majalengka	30,73	2.796	2.796		
		Kuningan					
		Bogor	18,64	8.508	17.016		
4	Kota Bogor	Kota Depok	25,07	497	3.976	9.293	23.008
	13 //	Kota Bogor	0,00	288	2.016		
		Garut	38,04	2.295	2.295		
		Ciamis	13,53	1.552	1.552		
CW/s	manuscript of the control of the control	Pangandaran	51,03	798	798		
5	Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya	9,80	394	394	5.147	5.311
		Kota Tasikmalaya	0,00	56	168		
		Kota Banjar	31,25	52	104		
		Kota Sukabumi	0,00	229	1.374		
6	Kota Sukabumi	Sukabumi	39,20	975	975	1.673	2.818
		Cianjur	21,00	469	469		

#### E. Perbandingan Kondisi Existing & Solusi Usulan

kondisi existing, rata-rata response pendistribusian bantuan logistik dari BPBD Jawa Barat menuju BPBD/Damkar kabupaten/kota adalah 87,93 menit. Sementara ketika solusi usulan pendistribusian berpola multiechelon diimplementasikan pada asumsi kondisi lalu lintas yang sama maka rata-rata response time diproyeksikan turun mencapai 48,56% ke nilai 42,70 menit. Di sisi lain pengimplementasian usulan solusi dengan dengan menjadikan kantor BPBD masing-masing wilayah sebagai titik demand membuat 6 wilayah tidak lolos ambang batas response time 60 menit. Keenam wilayah tersebut tidak lain adalah Kabupaten Sumedang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.



(Perbandingan Waktu Tempuh Existing dan Solusi Usulan)



GAMBAR 31 (Perbandingan Rata-Rata Waktu Tempuh *Existing* dan Solusi Usulan)

#### V. KESIMPULAN

Dengan menggunakan pendekatan *Maximal Coverage Location Problem* (MCLP), mulurnya *response time* pendistribusian bantuan logistik ke wilayah kabupaten/kota

dapat terminimalisir sejalan dengan diperkecilnya skala jangkauan distribusi lewat klusterisasi wilayah. Dari penyelesaian model, didapati bahwa seluruh titik *demand* akan terlayani ketika ditempatkan 5 atau 6 gudang. Kemudian setelah melewati verifikasi dan validasi, diputuskan bahwa solusi terpilih adalah solusi ke-2 (persamaan dengan fungsi pembatas  $P \le 6$ ). Dibandingkan dengan kondisi *existing*, solusi ke-2 berhasil menurunkan rata-rata *response time* sebesar 48,56%.

Lewat pengimplementasian solusi, kebijakan sistem persediaan bantuan logistik di wilayah Jawa Barat bermigrasi ke struktur multi-echelon. Pada struktur baru ini, BPBD Jawa Barat masih memegang tanggung jawab sebagai supplier tunggal. Perbedaan mencolok terjadi pada tingkatan ke-2 dimana jika sebelumnya ke-27 wilayah mengambil/menerima bantuan logistik secara mandiri ke/dari BPBD Jawa Barat, kini tugas tersebut cukup dilakukan oleh 6 BPBD/Damkar kabupaten/kota selaku pengelola gudang penyangga yang menjembatani aktivitas pendistribusian bantuan logistik antara BPBD Jawa Barat dan BPBD/Damkar kabupaten/kota. Enam BPBD/Damkar terpilih untuk menjalankan mandat tersebut antara lain: a) BPBD Kota Bekasi; b) BPBD Kota Cimahi; c) BPBD Kota Cirebon; d) BPBD Kota Bogor; e) BPBD Kota Tasikmalaya; dan f) BPBD Kota Sukabumi.

#### **REFERENSI**

- [1] BNPB, "Data Bencana," 1 Januari 2023. [Online]. Available: https://gis.bnpb.go.id/.
- [2] P. Coppola, Introduction to International Disaster Management (3rd Edition), Oxford: Butterworth-Heinemann, 2015.
- [3] Saeyeon Roh, Hsuan Hung Lin, Hyunmi Jang, "Performance Indicators for Humanitarian Relief Logistics in Taiwan," The Asian Journal of Shipping and Logistics, vol. 38, no. 3, pp. 173-180, 2022.
- [4] Navid Sahebjamnia, S. Ali Torabi, S. Afshin Mansouri, "A Hybrid Decision Support System for Managing Humanitarian Relief Chains," Decision Support Systems, vol. 95, pp. 12-26, 2017.
- [5] Saeyeon Roh, Dong-Wook Kwak, Anthony Beresford, Stephen Pettit, "Challenges in Humanitarian Logistics Management: An Empirical Study on Pre-Positioned Warehouses," International Symposium of Logistics: Reflections on Supply Chain Research and Practice, 2016.
- [6] L. N. V. Wassenhove, "Humanitarian Aid Logistics: Supply Chain Management in High Gear," Journal of the Operational Research Society, vol. 57, no. 5, pp. 475-489, 2006.
- [7] Stephen Pettit, Anthony Beresford, "Critical Success Factors in the Context of Humanitarian Aid Supply Chains," International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 39, no. 6, pp. 450-468, 2009.
- [8] Fritz Institute, "Humanitarian Logistics Conferences," Geneva, 2004.
- [9] Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana," 8 Maret 2008. [Online].

- Available:
- https://www.bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/mig ration/pubs/4.pdf.
- [10] BNPB, "Peraturan BNPB Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan," 29 Juni 2018. [Online]. Available: https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peratur an-kepala/2018/perban-4-tahun-2018-tentang-sistemmanajemen-logistik-dan-peralatan-bn-828.pdf.
- [11]BNPB, "Peraturan Kepala BNPB No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana," 30 Desember 2011. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/219658/perka-bnpb-no-20-tahun-2011.
- [12] BNPB, "Peraturan Kepala BNPB No. 26 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana," 31 Desember 2014. [Online]. Available: https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peratur an-kepala/2014/perka-26-tahun-2014.pdf.
- [13] BNPB, "Peraturan Kepala BNPB No. 25 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana," 16 Maret 2020. [Online]. Available: https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peratur an-kepala/2014/perka-25-tahun-2014-tentang-pengelolaan-pertanggungjawaban-bantuan-logistik-pb.PDF.
- [14] BNPB, "Peraturan Kepala BNPB No. 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat Bencana," 3 September 2012. [Online]. Available: https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/24/peratur an-kepala/2012/perka-10-tahun-2012-tentang-pengelolaan-bantuan-logistik-pada-status-keaadaan-darurat-bencana.pdf.
- [15] A. Agarwal, "Validation of Inventory models for Single-echelon Supply Chain using Discrete-event Simulation," arXiv: Optimization and Control, 2018.
- [16] Nadeera Ekanayake, Nilesh Joshi, & Shital Thekdi, "Comparison of Single-Echelon Vs. Multi-Echelon Inventory Systems using Multi-Objective Stochastic Modelling," International Journal of Logistics Systems and Management, vol. 23, no. 2, pp. 255-279, 2016.
- [17] Sunil Chopra & Peter Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6 penyunt., London: Pearson Education Limited, 2016.

- [18] C. B. Lee, "Multi-Echelon Inventory Optimization," Evant White Paper Series, pp. 1-13, 2023.
- [19] Liz Cantlebary & Lawrence Li, "Facility Location Problem," 21 Desember 2020. [Online]. Available: https://optimization.cbe.cornell.edu/index.php?title=Facility\_location\_problem.
- [20] Rajali Maharjan & Shinya Hanaoka, "Warehouse Location Determination for Humanitarian Relief Distribution in Nepal," Transportation Research Procedia, vol. 25, pp. 1151-1163, 2017.
- [21] Wen-Chen Lee & Neng-Shu Yang, "Location Problems Solving by Spreadsheets," WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 6, no. 8, pp. 469-480, 2009.
- [22] Richard Church & Charles ReVelle, "The Maximal Covering Location Problem," Papers of the Regional Science Association, vol. 32, pp. 101-118, 1974.
- [23] U. Supdana, Interviewee, Mekanisme Penyaluran dan Karakteristik Bantuan Logistik. [Wawancara]. 16 Agustus 2023.
- [24] Oded Berman, Zvi Drezner, & George O. Wesolowsky, "The Maximal Covering Problem with Some Negative Weights," Geographical Analysis, vol. 41, no. 1, pp. 30-42, 2009.
- [25] Kemenhub, "Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan," 29 Juli 2015. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/103508/permenhubno-111-tahun-2015.
- [26] Kementerian PUPR, "Peta Jalan Tol Indonesia," 6 Maret 2023. [Online]. Available: https://sigi.pu.go.id/portalpupr/apps/dashboards/ad6919 82b770462d8e236f8ca7e450f4.
- [27] BPS Provinsi Jawa Barat, "Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023," 28 Februari 2023. [Online]. Available: https://jabar.bps.go.id/publication/2023/02/28/57231a8 28abbfdd50a21fe31/provinsi-jawa-barat-dalam-angka-2023.html.
- [28] BPS, "Indeks Pembangunan Manusia 2022," 16 Mei 2023. [Online]. Available: https://www.bps.go.id/id/publication/2023/05/16/ef80b ec78ab91cb5b703b943/indeks-pembangunan-manusia-2022.html.
- [29] BNPB, "Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022," 15 Januari 2023. [Online]. Available: https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202022.pdf.